
Signifikasi *Leadership*: Perspektif Sunni dan Syi'ah

Bahrul Ulum

Dosen tetap Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah IAI Al-Qolam, Malang, Indonesia,
Email: bahrululum@alqolam.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:
Received Oct 2017
Accepted Oct 2017
Available Online Jun 2018

Keywords:
leadership
Sunni
Syiah

ABSTRACT

Disharmony on Sunni and Syi'ah groups are still being discussed among academics. The Sunni group reflects itself as a school that follows the teachings of the prophet who are forwarded by his companions. While Syi'ah reflects themselves as a follower of the prophet Muhammad through the path of *ahlul bayt* descendants of the prophet through Ali bin Abi Thalib and forwarded his offspring. Outside the study between Sunni and Syi'ah from the point of aqidah and the ordinances of worship, this paper intends to compare the theories of both groups by focusing on the concept of leadership, succession or the appointment of leaders, criteria of leaders, ordinances of appointment and who are eligible to appoint leaders. The authors draw the conclusion that the concept of Sunni politics in choosing leaders include; obedience to the leader, the power of the state head is sacred, the caliph is the shadow of God in the world, the leader is derived from the tribe of Quraisy, *syuro* is the urgent part, the appointment of the leader by *ahlul halli wa al-aqdi*. Unlike Sunni, Syi'ah groups use the concept of imamate or leadership that prioritized Ali and his descendants who are entitled to lead Muslim.

PENDAHULUAN

Keberadaan sebuah negara sangat penting dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari praktik Nabi Muhammad yang telah berhasil mendirikan sekaligus memimpin negara Madinah. Eksistensi negara inilah yang banyak membantu bahkan bisa disebut kunci efektifitas penerapan wahyu, sehingga terciptalah kebahagiaan, ketenteraman dan keharmonisan kehidupan manusia. Nabi tidak menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Hal ini terlihat dalam Piagam Madinah yang telah beliau susun yang tidak menyinggung sama sekali masalah tersebut.¹ Nabi tidak memberikan ketentuan atau peraturan yang baku dan mutlak harus diikuti oleh umatnya. Beliau hanya menggariskan prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan. Formulasi dan hal-hal lain yang bersifat teknis diserahkan sepenuhnya ke-pada umat Islam. Merekalah yang merumuskan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masalah yang mereka hadapi. Inilah asal mula kenapa Nabi tidak menunjuk siapa peng-gantinya kelak setelah beliau wafat. Kalau beliau langsung menunjuk siapa penggantinya, maka boleh jadi hal ini memunculkan kesan bahwa pola yang dilakukan Nabi tersebut harus diikuti oleh seluruh umat Islam (*al-Sunnah al-Muttaba'ah*).

Masalah suksesi adalah awal munculnya polarisasi kelompok politik yang diawali peristiwa wafatnya Nabi Muhammad. Masalah suksesi politik ini menyeret umat kepada dua polarisasi yaitu kelompok Sunni yang menjadi kelompok mayoritas dan kelompok Syi'ah yang menjadi kelompok minoritas. Polarisasi ini menjadi sangat jelas dan tajam sekali setelah terbunuhnya Khalifah 'Utsman Ibn 'Affan wafat di tangan umat Islam sendiri dan sebagai gantinya, sebagian umat Islam mengangkat 'Ali. Pengangkatan 'Ali ini ternyata tidak berjalan mulus. Ia mendapati gerakan oposisi. Di Madinah, 'Ali mendapat perlawanan dari Zubair, Thalhah dan 'Aisyah. Mereka melakukan perlawanan dan pemberontakan sehingga terjadi kontak fisik melalui perang Jamal.² Zubair dan Thalhah wafat terbunuh dalam perang tersebut, sedangkan 'Aisyah tetap diperlakukan baik dan dikembalikan ke Madinah.

¹ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 16

² Disebut perang Jamal karena pada saat peperangan tersebut 'Aisyah menunggang unta.

Lahirnya Kelompok Sunni dan Syi'ah

Sebelum membahas lebih jauh tentang sejarah munculnya kelompok Sunni dalam konstelasi politik Islam, ada baiknya disampaikan sekilas pengertian politik itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), politik berarti pengetahuan mengenai ketatanegaraan, seperti tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan dan sebagainya. Politik juga dapat diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan), siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain.³ Perlu diketahui bahwa sebagai suatu sistem, politik adalah suatu konsepsi yang berisikan antara lain tentang ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara, siapa yang bertugas dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, apa dasar yang dipakai, bagaimana cara menentukan dan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan. Di dalam politik sistem juga dipaparkan kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawab tersebut.⁴

Kelompok Sunni lahir dan menjadi kekuatan politik berawal dari peristiwa wafatnya Nabi Muhammad. Dua hari setelah Nabi wafat (sementara jasad beliau belum juga dikuburkan), sebagian besar sahabat Anshar mengadakan pertemuan untuk membicarakan suksesi di Saqifah Bani Sa'idah. Dalam perdebatan yang alot antara antara kaum Muhajirin dan Anshar, Abu Bakar akhirnya terpilih sebagai Khalifah.⁵ Mereka dapat menerima Abu Bakar karena ialah orang yang paling banyak mengalami asam garam bersama Nabi. Ia pula orang pernah disuruh Nabi untuk memimpin shalat jama'ah, sehingga orang-orang muhajirin mau menerima dan membai'atnya yang kemudian segera disusul oleh orang-orang Anshar. Bai'at ini terkenal sebagai bai'at umum.⁶ Pengangkatan ini ternyata memunculkan sikap oposisi. Keluarga Nabi terutama puteri beliau Fatimah, menyesalkan keputusan yang dinilainya terlalu terburu-buru itu sebelum pemakaman Nabi dan tidak mengikutsertakan *Ahlu al-Bait* seperti 'Ali Ibn abi Thalib dan 'Utsman Ibn 'Affan. Salman al-Farisi dan Abu Dzar al-Ghifari yang bersimpati kepada 'Ali tidak setuju dengan cara-cara musyawarah yang berakhir pada pemilihan Abu Bakar. Akan tetapi, pertimbangan umat Islam yang muncul waktu itu adalah kemaslahatan dan kesejahteraan umat

³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), Cet. XII, hlm. 763.

⁴Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), Cet. VIII, hlm. 268.

⁵Hasan Ali Hasan Dan Al-Tum Al-Thalib Muhammad, *Tarikh Al-Hadlarah Al-'Arabiyyah Al-Islamiyyah*, (Kuwait: Maktabah Al-Falah, 1986), hlm. 16-17.

⁶Ali Audah, *Ali Bin Abi Talib Sampai Kepada Hasan Dan Husain*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2008), Cet. IV, hlm. 82-83.

yang mungkin terancam jikalau masalah suksesi ini tidak segera diselesaikan.⁷ Kelompok pendukung Abu Bakar inilah yang pada akhirnya menjadi kelompok Sunni. Kelompok ini juga tetap memegang peranan sebagai kelompok dominan ketika 'Umar Ibn Khattab meneruskan tampuk kepemimpinan umat Islam. Ia juga menjadi penyokong utama pada era kepemimpinan 'Utsman Ibn 'Affan. Kelompok juga kembali meneruskan dominasinya dalam pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abbasiyyah. Kelompok ini begitu solid dalam memberikan legitimasi kepada pemerintahan masing-masing. Karena wataknya yang pro status quo, sekalipun beberapa kali berganti pemerintahan dan kekuasaan, kelompok ini selalu mendapatkan tempat di sisi pemerintahan dengan segala modelnya.

Adapun aliran Syi'ah lahir sebagai reaksi atas kelompok mayoritas Sunni yang sejak wafatnya Nabi Muhammad telah mendominasi dalam percaturan politik Islam. Mereka berpendapat bahwa yang berhak memegang kekuasaan politik setelah Nabi wafat adalah 'Ali Ibn Abi Thalib yang tiada lain sepupu Nabi sekaligus suami Fatimah Binti Rasulullah. Mereka mendasarkan teorinya kepada hadits Ghadir Khumm yang menceritakan perjalanan setelah haji wada' dimana Nabi dan serombongan umat Islam berhenti di sebuah tempat bernama Ghadir Khumm dan menyampaikan wasiat. Isi wasiat tersebut berisi tentang penunjukan 'Ali sebagai pengganti beliau kelak. Dalam hadits ini juga diceritakan bahwa setelah penunjukan 'Ali tersebut, 'Umar menemui 'Ali dan mengucapkan selamat kepadanya. Ia berkata kepada 'Ali: "*Mulai hari ini dan seterusnya, engkau adalah menjadi pemimpin kaum beriman, laki-laki dan perempuan*". Kelompok ini yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya kelompok Syi'ah yang dalam belakangan hari berhasil menjadi kekuatan politik tersendiri.⁸ Golongan ini juga mendasarkan pendapatnya pada sabda Nabi, ketika beliau merasa sakitnya semakin parah: "*Bawakan untukku alat tulis. Aku akan menyampaikan sesuatu pesan untukmu, supaya kalian tidak melakukan kesalahan nanti setelah aku wafat*". Namun 'Umar menolak dan menyatakan bahwa sakit Nabi sudah terlalu parah. Ia berkata: "*Kitab Allah cukup bagi kita*". Lalu orang-orang pun ribut menanggapi ucapan 'Umar tersebut. Menyaksikan keadaan ini, Nabi merasa terganggu dan memerintahkan mereka keluar, karena Nabi merasa mereka tidak pantas berselisih dan saling bertentangan di hadapan Rasulullah.⁹

⁷Sayyid Muhammad Husein Thabathaba'i, *Islam Syi'ah: Asal Usul Dan Perkembangannya*, Terjemahan Djohan Effendi, (Jakarta: Grafiti Press, 1993), hlm. 40.

⁸Musa Al-Musawi, *Al-Syi'ah Wa Al-Tashih: Al-Shuro' Baina Al-Syi'ah Wa Al-Tasyayyu'*, (TP, 1988), hlm. 9-10.

⁹Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Jilid I* (Kairo: Dar Al-Fikr, TT), hlm. 4.

Golongan Syi'ah mengklaim bahwa Nabi meminta alat tulis untuk mendiktekan bahwa 'Ali akan menjadi penggantinya kelak. Oleh sebab itulah, mereka menuduh Abu Bakar dan 'Umar telah merampas hak kekhilafahan tersebut dari tangan 'Ali. Hal inilah yang selalu mereka perjuangkan yang dimulai sejak hidupnya 'Ali sampai meninggalnya. Tidak heranlah apabila persoalan imamah ini menjadi hal yang urgen dan prinsipil bagi kalangan Syi'ah. Pada perkembangannya, aliran Syi'ah terpecah menjadi puluhan cabang atau sekte. Perpecahan ini terjadi karena perbedaan pandangan mereka tentang sifat imam; apakah ia terpelihara dari dosa (*ma'shum*) atau tidak, serta perbedaan dalam menentukan pengganti imam. Dalam masalah ke-*ma'shum*-an imam, sebagian berpendapat bahwa imam 'Ali dan imam-imam lainnya *ma'shum* sebagaimana diyakini oleh kelompok Syi'ah Imamiyyah dan Isma'iliyyah. Sementara kelompok Syi'ah yang lain berpendapat para imam tersebut tidak terpelihara dari dosa. Sedangkan dalam masalah siapa yang berhak menggantikan imam, sebagian kelompok ada yang mengangkat Zaid Ibn 'Ali, sementara yang lain tidak menyetujui dan mengangkat yang lain sebagai imam mereka. Dari sekian banyak jumlahnya, sekte-sekte Syi'ah dapat dikelompokkan ke dalam aliran yang moderat, ekstrem dan di antara dua kutub tersebut. Kelompok yang moderat umumnya memandang 'Ali sebagai manusia biasa. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya yang paling utama menerima tongkat estafet kepemimpinan umat adalah 'Ali, akan tetapi karena umat Islam telah sepakat memilih Abu Bakar sebagai penerus kepemimpinan itu, mereka masih bisa menerimanya sesuai dengan dasar musyawarah sebagaimana diajarkan oleh al-Qur'an.

Sedangkan kelompok ekstrem memperlakukan 'Ali sebagai manusia super. Bahkan ada sebagian kelompok yang menganggap 'Ali derajatnya lebih tinggi dari Nabi Muhammad sendiri. Kelompok yang lebih ekstrem tidak lagi melihat 'Ali sebagai lebih tinggi dari Nabi, tetapi sebagai penjelmaan Tuhan. Sementara kelompok yang terakhir memandang 'Ali sebagai pewaris sah jabatan Khalifah (imam) dan menuduh Abu Bakar dan 'Umar telah merebut jabatan itu dari 'Ali. Akan tetapi mereka tidak menganggap 'Ali lebih tinggi dari Nabi Muhammad atau penjelmaan Tuhan. Di antara sekian banyak kelompok-kelompok dalam Syi'ah, hanya terdapat tiga sekte besar yang berpengaruh dalam mazhab Syi'ah hingga saat ini yaitu; Syi'ah Zaidiyyah, Isma'iliyyah (Sab'iyyah) dan Imamiyyah (Isna 'Asyariyyah). Dalam kajian ini hanya tiga sekte inilah yang akan mendapat perhatian, karena dianggap mewakili kelompok-kelompok Syi'ah yang lain. Semua sekte mengakui 'Ali Ibn Abi Thalib, Hasan Ibn 'Ali, Husein Ibn 'Ali dan 'Ali Zainal 'Abidin sebagai imam mereka. Namun setelah 'Ali Zainal 'Abidin, mereka berbeda pendapat dalam menentukan imam. Sebagian memilih Zaid Ibn 'Ali sebagai imam. Sekte ini pada akhirnya dikenal sebagai sekte

Zaidiyyah. Kelompok yang lain memilih putera 'Ali Zainal 'Abidin yang lain bernama Muhammad al-Baqir sebagai imam mereka. Setelah al-Baqir, imam mereka adalah Ja'far al-Shadiq.

Mereka kembali berselisih paham tentang siapa yang berhak menjadi imam setelah Ja'far Shadiq. Di antara perselisihan tersebut, sebagian kelompok memilih Isma'il Ibn Ja'far sebagai imam selanjutnya, sementara kelompok yang lain memilih Musa al-Kazhim. Setelah Musa al-Kazhim, berturut-turut imam mereka adalah 'Ali al-Ridha, Muhammad al-Taqi, 'Ali al-Hadi, Hasan al-'Askari dan Muhammad al-Mahdi. Sekte terakhir inilah yang belakangan dikenal sebagai sekte Imamiyyah atau Isna 'Asyariyyah. Mereka disebut sekte Imamiyyah karena masalah imamah (kepemimpinan) ini menjadi bagian rukun Islam mereka, sehingga menjadi bagian dari kewajiban yang harus mereka lakukan dan mereka pertahankan sebagaimana rukun-rukun Islam yang lain semacam shalat, puasa dan lainnya. Sedangkan kelompok ini bisa juga disebut Isna 'Asyariyyah karena mereka mengakui adanya dua belas imam yang memimpin mereka. Mereka menganggap kedua belas imam inilah yang menjadi spirit perjuangan politik mereka. Kelompok terakhir inilah yang tampaknya paling eksis dibandingkan sekte-sekte sebelumnya. Kelompok ini kemudian tidak berhenti dalam konsep pemikiran politik saja, melainkan juga memasuki ranah kajian-kajian fiqh, bahkan mampu mendirikan bangunan mazhab sendiri seperti mazhab Ja'fari yang mendasarkan keputusan-keputusan hukumnya Imam Ja'far al-Shadiq.

Untuk lebih jelasnya dalam melihat urutan para imam dalam konsep kepemimpinan Syi'ah bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

1. 'Ali
2. Hasan
3. Husein
4. 'Ali Zainal 'Abidin
5. Mohd. Al-Baqir
6. Ja'far al-Shadiq
7. Musa al-Khazim
8. 'Ali al-Ridha
9. Muhammad al-Taqi
10. 'Ali al-Hadi
11. Hasan al-'Askari
12. Muhammad al-Mahdi.

Teori *Leadership* Perspektif Sunni Dan Syi'ah.

Sebagai kelompok mayoritas, pola pikir Sunni biasa menyokong status quo. Pemikiran politik Sunni biasanya membela dan mempertahankan kekuasaan. Hal ini menyebabkan tidak jarang kelompok ini menjadi semacam alat legitimasi dan justifikasi bagi kekuasaan Khalifah yang berkuasa saat itu. Kalangan Ulama Sunni pada umumnya melarang rakyat yang dalam hal ini adalah umat Islam melakukan pemberontakan terhadap penguasa sekalipun dzalim. Mereka berpendapat, penguasa yang dzalim lebih baik dari pada tidak ada kepemimpinan dalam Islam. Pemikiran demikian wajar apabila muncul permukaan, sebab pemikiran semacam ini dapat dilacak akarnya yang berasal dari pendapat beberapa tokoh politik Sunni mengenai sumber kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki penguasa. Satu hal yang menarik, mereka berpendapat bahwa kekuasaan kepala negara dalam hal ini Khalifah berasal dari Tuhan. Pendapat ini kemudian tampak ke permukaan dengan dimulainya pemakaian gelar semacam Khalifah (wakil) Tuhan di bumi-Nya pada periode Khalifah Abu Ja'far al-Manshur dari Bani 'Abbasiyah. Pemakaian ini terus digunakan oleh para penerusnya. Konsep semacam ini barangkali menjadi pengulangan sejarah dari raja-raja Persia dulu yang gemar menganggap raja-raja mereka sebagai wakil Tuhan.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Khalifah memerintah berdasarkan mandat Tuhan. Bahkan lebih lanjut, muncul pernyataan di kalangan Sunni bahwa kekuasaan bersifat mutlak dan wajib dipatuhi. Kepatuhan disini bersifat mutlak adanya dan tidak dapat diganggu gugat. Pendapat ini muncul sebenarnya dengan mengambil legitimasi akan keistimewaan hak-hak Khalifah atas rakyatnya melalui ajaran agama. Pengambilan dasar ini berasal dari surat al-An'am ayat 165 dan surat al-Nisa' ayat 59: *"Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*.¹⁰ *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"*. (QS. 4: 59).¹¹

¹⁰Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

¹¹Ibid.

Menurut Ibnu Abi Rabi' sebagaimana dikutip Muhammad Iqbal, kedua ayat tersebut merupakan penegasan bahwa Allah telah memberi keistimewaan kepada para raja dengan segala keutamaan dan memperkokoh kedudukan mereka di bumi-Nya. Oleh karena itu, Allah mempercayakan kepada mereka untuk memimpin hamba-hamba-Nya yang lain. Allah juga mewajibkan kepada para Ulama untuk mematuhi, menghormati dan mengagungkan mereka.

Menurut Al-Ghazali (1058-1111 M), sumber kekuasaan adalah Tuhan itu sendiri. Kemudian kekuasaan ini dilimpahkan kepada sebagian kecil saja dari hamba-Nya. Oleh karena itu, menurutnya kekuasaan tersebut bersifat sakral (*Muqoddas*) dan bagi rakyat harus mengikuti penguasa atau kepala negara. Al-Ghazali juga melarang umat melakukan pemberontakan terhadap kepala negara. Ia berpendapat bahwa, pembentukan pemerintahan bukanlah berdasarkan pertimbangan rasio semata, melainkan atas perintah agama (*Syar'i*). Agama mustahil dapat dilaksanakan secara baik kalau situasi dan kondisi tidak mendukung dan pendukung yang paling utama dalam hal ini adalah negara. Dalam perspektif al-Ghazali, agama adalah basis atau landasan kehidupan manusia, sedangkan kekuasaan politik adalah penjaganya. Keduanya dapat dipastikan memiliki hubungan yang erat. Politik tanpa agama bisa hancur, sedangkan agama tanpa politik dapat hilang dari kehidupan manusia. Kekuasaan politik yang dijalankan penguasa menjadi harapan terlaksananya kehidupan dalam harmoni pelaksanaan agama.¹²

Ibnu Taimiyah berpendapat, bahwa eksistensi kepala negara mutlak dibutuhkan umat Islam yang tidak saja akan menjamin jiwa dan harta masyarakatnya, akan tetapi juga dalam rangka menjamin berjalannya hukum-hukum Allah. Oleh karenanya, sejalan dengan pendapat kedua tokoh sebelumnya, ia menyatakan bahwa kepala negara adalah bayang-bayang Allah di muka bumi. Kekuasaan dan kewenangannya pun juga berasal dari Allah. Jadi tidak perlu diragukan lagi nilai-nilai sakralitasnya. Pendapat beberapa tokoh Sunni yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa hal ini sangat menarik untuk dicermati. Menariknya karena, pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidun*, belum muncul konsep semacam ini. Mereka pada umumnya tidak menggunakan simbol-simbol sakral dalam melegitimasi kekuasaannya. Abu Bakar misalnya, kurang berkenan di panggil *Khalifatullah* (pengganti Allah) dan lebih senang dipanggil *Khalifah Rasulillah* (pengganti utusan Allah).

¹²Al-Ghazali, *Al-Iqtishad Fi Al-I'tiqad*, (Mesir: Maktabah Al-Jund, 1972), hlm. 198-199.

'Umar Ibn Khattab lebih senang dipanggil dengan sebutan *Amir al-Mu'minin* (pemimpin kaum beriman).

Menurut Muhammad Husain Haekal, kenyataan semacam ini menunjukkan bahwa Abu Bakar dan kaum muslimin pada umumnya di masa tersebut mempunyai konsep yang jelas tentang pemerintahan. Karena berabad-abad sebelum kedatangan Rasulullah, di banyak kerajaan bahkan hampir seluruh dunia dipakai konsep bahwa penguasa sebagai wakil Tuhan di bumi. Rakyat pun ternyata mengakui bahwa penguasa mereka memiliki sifat-sifat ketuhanan. Konsep ini terutama berkembang di negara-negara seperti Mesir kuno, Assiria dan Persia. Akibat yang muncul tentunya mereka menganggap bahwa kekuasaan yang mereka miliki bersifat mutlak dan tidaklah dapat diganggu gugat adanya.¹³ Dalam sistem pemerintahan awal menunjukkan bahwa Abu Bakar dan kaum muslimin generasi awal tidak ingin mengikuti pola pemerintahan seperti yang telah banyak berlaku di berbagai penjuru dunia kala itu. Ia tidak mengakui kekuasaan yang dimilikinya berasal dari Tuhan, apalagi sebagai bayang-bayang Allah. Ia merasa kedudukannya sama seperti rakyat pada umumnya, hanya saja ia lebih ditinggikan sedikit, lebih didahulukan dari pada yang lain demi untuk memimpin umat Islam.

Hal ini terkesan ironis kalau dibandingkan dengan model pemerintahan awal dalam Islam, karena beberapa tokoh Sunni mengubah konsep Khalifah (kepala negara) sebagai *Khadim al-Ummah* (pelayan umat) menjadi *Dzill Allah* (bayang-bayang Allah) yang dipastikan memiliki kekuasaan besar dan luas tak terbatas. Pemikiran semacam ini sudah barang tentu tidak terlepas dari kepentingan politik para penguasa dalam rangka pertahanan supremasi atas rakyatnya. Karena dengan demikian penguasa dapat aman dalam menjalankan kekuasaan dan menikmati kedudukannya. Di samping itu, pengaruh-pengaruh kebudayaan asing yang berkembang saat itu, terutama dari Persia yang menempatkan penguasa sebagai wakil Tuhan, sedikit banyak telah memberi andil besar atas berkembangnya konsep tersebut dalam dunia Sunni. Hal ini wajar terjadi karena begitu besarnya pengaruh Persia dalam sistem pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. Konsekuensi dari kekuasaan kepala negara yang sakral, baik Ibnu Abi Rabi', Ibnu Taimiyah maupun al-Ghazali berpendapat bahwa kepala negara tidak dapat diturunkan dari jabatannya. Kekuasaan pemerintah bersifat mutlak, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan dengan cara apapun. Ibnu Taimiyah mengharamkan umat Islam melakukan pemberonta-

¹³Muhammad Husain Haekal, *Abu Bakar Al-Shiddiq*, Terjemahan dari Ali Audah, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1995), hlm. 322-323.

kan terhadap negara, selama ia masih menjalankan keadilan dan tidak menyuruh berbuat maksiat kepada Allah. Ibnu Taimiyah mengutip sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa siapa yang melihat sesuatu yang tidak disukainya dari pemimpinnya, hendaklah ia bersabar. Siapa yang keluar dari pemerintahannya (memberontak) kemudian mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyyah.

Al-Mawardi (975-1059 M) rupanya berbeda dengan dengan ketiga tokoh di atas. Ia berpendapat bahwa sumber kekuasaan kepala negara adalah berdasarkan perjanjian antara kepala negara dengan rakyatnya yang berbentuk semacam kontrak sosial. Dari perjanjian ini pada akhirnya melahirkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak. Hal ini membawa konsekwensi kekuasaan negara tidak lagi sakral sebagaimana diyakini oleh ketiga tokoh di atas. Oleh karena itu, rakyat yang telah memberikan kekuasaan dan sebagian haknya kepada kepala negara boleh menurunkan kepala negara, apabila dipandang tidak mampu lagi menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kontrak sosial yang telah disepakati sebelumnya. Namun sekalipun ia tidak menganggap kekuasaan itu sebagai sesuatu yang sakral, ia sepakat dengan ketiga tokoh sebelumnya yang menyatakan kepatuhan penuh kepada penguasa merupakan harga mati. Sekalipun pemimpin itu seorang yang *fajir* (jahat), rakyat harus tetap mematuhi. Untuk menguatkan pendapatnya, al-Mawardi mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, “*Akan ada kelak pemimpin-pemimpin kamu sesudahku. Di antara mereka ada yang baik dan memimpinmu dengan kebajikannya. Tapi ada juga yang jahat dan memimpinmu dengan kejahatannya. Dengarkanlah dan patuhilah mereka sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebajikannya utntuk kamu dan untuk mereka. Tetapi kalau mereka berbuat jahat, maka (akibat baiknya) untuk kamu dan kejahatannya kembali kepada mereka*”.¹⁴

Ciri lain dari pemikiran politik golongan Sunni ini adalah penekanan mereka kepada golongan Quraisy sebagai syarat kepala negara. Pandangan mereka didasarkan kepada hadits yang menyatakan bahwa imam-imam (pemimpin) umat Islam harus berasal dari suku Quraisy (*Al-Aimmah Min Quraisyin*). Al-Ghazali, al-Juwaini, al-Baqillani dan al-Mawardi menyatakan syarat ini dengan tegas. Sedangkan Ibnu Abi Rabi' tidak menyinggung sama sekali masalah syarat suku Quraisy sebagai pemimpin. Akan tetapi bukanlah berarti bahwa ia membenarkan selain suku Quraisy untuk memegang jabatan sebagai kepala negara. Ia tidak membahas persyaratan ini karena pada masanya (yaitu masa

¹⁴Al-Mawardi, *Al-Ahkamu Al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, TT), hlm. 5.

Bani Abbasiyah) suku Quraisy sedang mencapai puncak kekuasaannya. Begitu kuatnya pengaruh dan kekuasaan suku Quraisy ketika itu, sehingga tidak terbayangkan jabatan tertinggi itu bisa jatuh kepada selain suku Quraisy.

Berbeda dengan pandangan para tokoh Sunni di atas, Ibnu Khaldun (1332-1406 M) berpendapat bahwa syarat Quraisy tersebut bukanlah harga mati yang harus dilaksanakan setiap masa. Nabi menurutnya, dalam menjelaskan masalah suku Quraisy untuk menjadi pemimpin umat Islam adalah karena pada masa itu suku Quraisy memiliki kewibawaan dan kekuatan yang paling disegani di seluruh Jazirah Arab. Suku ini mempunyai '*Ashabiyah* atau solidaritas yang kuat. Solidaritas inilah yang menjadikan mereka menjadi pemimpin yang kuat dan berkarakter. Ikatan '*Ashabiyah* inilah yang mengantarkan mereka menjadi pemimpin yang kuat saat itu. Namun sejalan dengan perkembangan waktu, perubahan situasi dan kondisi, tidak tertutup kemungkinan bagi suku yang lain untuk mempunyai '*ashabiyah* yang kuat sebagaimana yang terdapat dalam tradisi Quraisy. Suku lain bisa saja mengambil tampuk kekuasaan asalkan mereka mampu.¹⁵ Dalam pandangan semacam ini, Ibnu Khaldun melakukan lompatan dalam menafsirkan hadits Nabi tentang keharusan suku Quraisy sebagai kepala negara. Hadits ini dipahami Ibnu Khaldun bahwa imam itu berasal dari suku Quraisy atau suku lain yang memiliki kecakapan dan kemampuan sebagaimana yang dimiliki suku Quraisy.

Ada satu hal yang patut dicatat dari teori pemikiran Islam Sunni ini bahwa konsep *syura* (musyawarah) telah luput dari perhatian mereka. Dengan kata lain, di dalam kamus politik Sunni masalah itu luput dari pencantumannya. Konsep *syura* yang mengajarkan kepada kita sikap demokratis dan secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an surat Ali 'Imran ayat 159 dan al-Syura ayat 38 telah terkubur dalam percaturan politik sejak naiknya Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan sebagai pendiri Dinasti Bani Umayyah. Ia adalah orang pertama dalam Islam yang mengubah sistem pemerintahan Islam yang berbasis musyawarah sebagaimana dipraktikkan pada zaman Nabi hingga Khalifah yang empat kepada sistem monarkhi atau kerajaan secara absolut. Ironisnya, langkah Bani Umayyah ini juga diikuti oleh bani Abbasiyyah yang telah berhasil menggulingkan Dinasti tersebut. Pada masa Bani Abbasiyyah, umumnya para pemikir politik Sunni adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, teori politik mereka tidak dapat terlepas

¹⁵Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, (Mesir: Mushtafa Muhammad, TT), hlm. 193-196.

dari kondisi realitas politik yang mereka hadapi. Tidak mengherankan kalau mereka berusaha memberikan legitimasi dan mempertahankan pemerintah yang sedang berkuasa.

Ini merupakan suatu kewajaran kalau konsep kepatuhan mutlak yang harus diberikan rakyat kepada penguasa dan syarat keharusan suku Quraisy untuk menjabat kepala negara telah berhasil mengaburkan visi pemikir-pemikir Sunni terhadap konsep *syura* yang pada intinya adalah mengikutsertakan masyarakat dalam mengontrol jalannya roda pemerintahan. Konsep *syura* pun semakin jauh dari teori politik Sunni dengan berkembangnya doktrin Khalifah sebagai bayangan Allah sehingga tidak dapat diturunkan dari jabatannya. Memang ada di antara pemikir politik Sunni yang membicarakan lembaga *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* dan musyawarah. Tokoh yang getol membicarakan masalah ini adalah al-Mawardi. Ia berpendapat bahwa kepala negara diangkat oleh *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* atau *Ahlu al-Ikhtiyar*. Ia pun mensyaratkan *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* harus memenuhi kriteria adil, mengetahui dengan baik kualifikasi calon kepala negara dan mempunyai wawasan yang luas serta perspektif ke depan bagi kemaslahatan umat Islam.

Dengan persyaratan keanggotaan *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* seperti ini, mereka dapat menentukan dan memilih calon kepala negara yang paling cocok bagi umat Islam. Namun siapa yang berhak menjadi anggota *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* dan bagaimana cara rekrutmen anggota tersebut tidak dijelaskan lebih jauh oleh al-Mawardi. Dalam perkembangan selanjutnya, *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* bahkan berada di bawah pengaruh kepala negara, karena kepala negaralah yang mengangkat mereka. Oleh karenanya, mereka cenderung lebih bersikap kooperatif dan akomodatif terhadap kekuasaan. *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* tidak lebih sekedar alat legitimasi ambisi politik penguasa atas tindak-tanduknya. Karena dipilih oleh penguasa, *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* tidak mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat. Eksistensi *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi* tidak banyak membawa perubahan kembali ke *syura* yang efektif berjalan hanya selama masa *Khulafa' al-Rasyidun*. al-Mawardi menegaskan kemungkinan pembebasan kepala negara dari jabatannya bila ia menyimpang dari keadilan, kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya atau tidak dapat menjalankan tugasnya secara baik karena dikelilingi orang-orang terdekat yang menyetir kebijakan-kebijakannya. Namun begitu al-Mawardi berpendapat, bahwa penyimpangan kepala negara tidak secara otomatis menyebabkan penurunannya dari jabatan tersebut, apabila ia dapat mendukung tindakannya secara logis. Disamping itu, al-Mawardi juga tidak membicarakan bagaimana mekanisme pembebasan kepala negara dari jabatannya dan siapa yang berhak melakukannya. Pandangan al-Mawardi ini menempatkan kepala negara pada

posisi yang kuat dan rakyat pada posisi yang lemah. Dalam masalah ini, rakyat tidak dapat berperan banyak dalam hal kontrol terhadap kebijakan-kebijakan kepala negara.

Senada dengan al-Mawardi, Ibnu Taimiyah juga membahas konsep *syura* dalam teori politiknya. Ia juga mengutip surat al-‘Imran ayat 159 dan al-Syura ayat 38 sebagai landasan kewajiban melakukan musyawarah ini. Namun di dalam kajiannya, Ibnu Taimiyah tampaknya tidak membahas masalah-masalah mendasar dari musyawarah, seperti mekanisme pelaksanaannya dan peranan anggota masyarakat dalam mengontrol kekuasaan kepala negara. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang kepatuhan mutlak terhadap kepala negara kelihatannya telah menghilangkan hak-hak anggota masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan *syura* ini. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan politik dan kebijakan pengambilan keputusan hanya berada di tangan sebagian kecil kaum elit politik saja. Hal ini membuka peluang bagi penguasa untuk bertindak otoriter. Nampaknya Ibnu Taimiyah memang tidak melakukan usaha yang serius dalam membangun teori politiknya dengan landasan *syura*.¹⁶

Secara ringkas pemikiran politik sunni dapat dilihat sebagai berikut:

1. Ketaatan kepada pemimpin adalah harga mati.
2. Kekuasaan kepala negara bersifat sakral.
3. Khalifah adalah bayang-bayang Allah di dunia (*The Shadow Of God On The Earth*).
4. Pemimpin adalah dari suku Quraisy.
5. Musyawarah (*Syuro*) adalah bagian urgen.
6. Pengangkatan pemimpin oleh *Ahlul Halli Wa al-‘Aqdi*.
7. Sebagian berpendapat bahwa pemimpin boleh diturunkan asalkan tidak menjalankan pemerintahan sesuai yang disepakati.

Sedangkan dalam pemikiran Syi'ah, seperti dijelaskan di atas, persoalan suksesi (imamah) adalah hal yang prinsipil. Mereka beranggapan bahwa orang yang berhak menjadi imam (Khalifah) menggantikan Nabi adalah ‘Ali Ibn Abi Thalib. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang penunjukan ‘Ali sebagai Khalifah, apakah melalui wasiat tertulis dari Nabi atau tidak. Menurut Zaidiyah, Nabi tidak mengatakan bahwa ‘Ali adalah orang yang akan menggantikan beliau, apalagi mewasiatkannya. Nabi hanya menyebut sifat-sifat dan kualifikasi calon pengganti beliau saja, yaitu taqwa, berilmu, zuhud, berani dan

¹⁶Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 40.

pemurah. 'Ali berhak mendapat jabatan tersebut karena semua sifat-sifat yang telah disebutkan Nabi di atas terdapat dalam kepribadian 'Ali.

Berdasarkan pendapat ini, mereka dapat menerima kekhalifahan Abu Bakar dan 'Umar. Dalam perspektif mereka, 'Ali adalah yang *afdhal* (lebih berhak), akan tetapi apabila umat Islam lebih memilih Abu Bakar dan 'Umar yang dalam pandangan mereka sebagai *mafdhul* (kurang *afdhal*), mereka tetap bisa menerimanya. Menurut Zaid Ibn 'Ali (imam sekte Zaidiyah), sifat-sifat yang diisyaratkan Nabi dalam wasiatnya bukanlah sifat yang wajib ada keseluruhannya untuk imam yang akan diangkat. Sifat-sifat tersebut hanyalah bagian dari kesempurnaannya. Sekte Isma'iliyyah dan Imamiyyah berpendirian bahwa kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah adalah berdasarkan ketentuan Nabi sendiri melalui wasiatnya, bukan melalui isyarat sifat-sifat imam saja. Dalam wasiat ini, Nabi secara tegas menyebut langsung nama 'Ali sebagai penerima tongkat estafet kepemimpinan umat Islam. Dari sini mereka menganggap Abu Bakar dan 'Umar telah merampas kekhalifahan dari tangan 'Ali.

Untuk lebih jelasnya, perbedaan ketiga sekte ini dalam melihat posisi imamah bisa dilihat sebagai berikut:

SEKTE	KUALIFIKASI IMAM			DOKTRIN		
	Jumlah Imam	Dasar Pengangkatan	Harus Ali	'Ishmah	Ghaibah	Intidzar
Zaidiyah	5 Orang	Isyarat sifat-sifat Imam Oleh Rasulullah	Tidak ('Ali afdhol selainnya mafdhul)	Tidak	Tidak	Tidak
Isma'iliyyah	7 Orang	Wasiat Nabi Secara Tegas Melalui Hadith Ghadir Khum	Ya	Ya (Tidak pernah salah)	Ya	Ya
Imamiyyah	12 Orang	Wasiat Nabi Secara Tegas Melalui Hadith Ghadir Khum	Ya	Ya (Tidak boleh salah)	Ya	Ya

Analisa Perbandingan

Kelompok Sunni adalah kelompok yang dominan sejak awal perjalanan sejarah Islam. Kelompok ini selalu mendapatkan tempat yang luas dalam ruang sejarah karena banyak didukung mayoritas umat Islam. Kenyataan ini membawa konsekwensi kelompok ini selalu mendapatkan tempat dalam ranah politik yang dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad saw. Kesempatan ini dimanfaatkan secara baik oleh Khalifah pertama Abu Bakar dengan mengkonsolidasi seluruh umat Islam. Hal ini terus berkelanjutan pada masa pemerintahan 'Umar Ibn Khattab yang kemudian diteruskan oleh 'Utsman Ibn 'Affan.

Kelompok Syi'ah baru mendapatkan momentum politiknya di masa kekhalifahan 'Ali Ibn Abi Thalib. Peristiwa ini yang paling dinanti oleh kelompok tersebut, karena mereka sangat mengidam-idamkannya sejak lama. Mereka menganggap 'Ali lah sebenarnya yang paling berhak menduduki jabatan politik sepeninggal Rasulullah. Sebagian kelompok ini bahkan ada yang menuduh Abu Bakar dan 'Umar telah merampas hak kekhalifahan yang semestinya harus dilanjutkan oleh 'Ali. Kelompok Syi'ah yang semacam ini adalah kelompok Syi'ah yang paling ekstrim. Lebih lanjut mereka memandang 'Ali sebenarnya memiliki derajat yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad sendiri, bahkan sebagian diantara mereka melihat 'Ali sebagai penjelmaan Tuhan. Kelompok Syi'ah yang moderat memandang kekhalifahan tidak harus langsung diambil alih oleh 'Ali. Mereka juga bisa menerima kekhalifahan Abu Bakar dan 'Umar. Sementara kelompok yang terakhir memandang 'Ali sebagai pewaris sah jabatan Khalifah (imam) dan menuduh Abu Bakar dan 'Umar telah merebut jabatan itu dari 'Ali. Akan tetapi mereka tidak menganggap 'Ali lebih tinggi dari Nabi Muhammad atau penjelmaan Tuhan. Mereka juga mau menerima kepemimpinan Abu Bakar dan 'Umar sekalipun status mereka berdua adalah *mafduhul* (tidak lebih utama dari 'Ali). Konsep kepemimpinan menurut Sunni adalah sebagai berikut:

1. Ketaatan kepada pemimpin adalah harga mati. Konsep seperti sangat berpeluang terjadi arogansi pemimpin. Karena ia diposisikan sebagai manusia super sebagaimana dalam kerajaan-kerajaan Persia dan Romawi
2. Kekuasaan kepala negara bersifat sakral. Kesewenang-wenangan pemimpin sangat mungkin terjadi dengan justifikasi semacam ini. Ia seakan-akan menjadi manusia suci yang tidak pernah bersalah. Karena kesucian ini membawa konsekwensi terjadinya kesalahan apapun menjadi benar atas nama kesucian itu sendiri.

3. Khalifah adalah bayang-bayang Allah di dunia (*The Shadow Of God On The Earth*). Konsep semacam ini terdapat titik kelemahan dari sisi tidak munculnya keterbukaan kritik social sebagai *agent of social control*. Padahal kritik sangat diperlukan dalam menyeimbangkan kontelasi politik agar pemimpin bisa berkaca diri serta melakukan intropeksi diri.
4. Pemimpin adalah dari suku Quraisy. Konsep ini sebenarnya muncul di saat tampak kekuasaan selalu di tangan suku Quraisy. Para pemikir politik Sunni mungkin tidak membayangkan kekuasaan itu jatuh ke tangan orang-orang selain Quraisy. Akan tetapi sebenarnya konsep tidak relevan lagi di zaman sekarang, sebab banyak muncul orang-orang yang berkompeten dalam memimpin umat yang berasal dari luar suku Quraisy. Yang terpenting dari kepemimpinan itu adalah kecakapan dalam menejemen politik, memiliki kapabelitas, integritas dan kemampuan dalam mengatur masyarakat.
5. Musyawarah (*Syuro*) adalah bagian urgen. Konsep ini tampaknya adalah yang paling penting dari pemikiran politik Sunni, karena konsep ini yang paling banyak dipakai oleh mayoritas negara. Konsep inilah yang bisa menjaga stabilitas politik sebagaimana yang dipraktikkan pada zaman Nabi, Abu Bakar dan 'Umar Ibn Khattab.
6. Pengangkatan pemimpin oleh *Ahlul Halli Wa al-'Aqdi*. Konsep ini sebenarnya terlalu modern di zamannya, sekalipun dalam tataran praksis konsep ini hanya isapan jempol belaka, karena pada kenyataannya *Ahlul Halli Wa al-'Aqdi* ini diangkat oleh penguasa itu sendiri.
7. Sebagian berpendapat bahwa pemimpin boleh diturunkan asalkan tidak menjalankan pemerintahan sesuai yang disepakati. Sekalipun ide ini muncul dari kalangan Sunni tapi dalam kenyataan di lapangan, konsep ini belum pernah terjadi. Penurunan pemimpin yang sedang berkuasa dilakukan dengan cara kudeta sebagaimana kudeta Bani Umayyah ke Bani Abbasiyyah. Dan begitu seterusnya terjadi di zaman Bani Abbasiyyah sendiri.

Sedangkan ruh dari pemikiran Syi'ah adalah terletak pada konsep imamah. Imamah adalah satu yang paling penting dalam pemikiran politik mereka karena mereka mengalami kekecewaan demi kekecewaan karena mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk memimpin umat dalam waktu yang relatif cukup lama. Sehingga konsep imamah ini menjadi semacam harapan terbesar mereka karena dalam waktu yang sangat lama tidak mendapatkan posisi politik yang strategis. Kerinduan mereka akan posisi politik menyebabkan mereka cenderung berpikir kurang rasional. Sehingga sebagian dari mereka ada yang menganggap 'Ali sebagai penjelmaan Tuhan sebagaimana yang banyak diyakini dalam alam pikiran kerajaan-kerajaan yang bukan Islam.

PENUTUP

Kelompok Sunni telah muncul sejak awal mula Islam datang terutama mendapatkan momentum pasca wafatnya Rasulullah. Di antara konsep politik mereka antara lain: ketaatan kepada pemimpin adalah harga mati, kekuasaan kepala negara bersifat sakral, khalifah adalah bayang-bayang Allah di dunia, pemimpin adalah dari suku Quraisy, musyawarah (*syuro*) adalah bagian urgen, pengangkatan pemimpin oleh *Ahlul Halli Wa al-'Aqdi*. Kelompok Syi'ah lahir sebagai reaksi dari kelompok Sunni. Mereka berpendapat hanya 'Ali dan keturunannya saja yang berhak menjadi penerus Rasulullah dalam kepemimpinan umat Islam. Hal ini didasarkan pada hadits yang dikenal sebagai hadits Ghadir Khumm dan hadits yang menceritakan wasiat Nabi yang digagalkan 'Umar. Pemikiran yang paling penting dari pemikiran politik kelompok Syi'ah ini terletak pada konsep imamah atau kepemimpinan yang mengutamakan - bahkan sebagian sekteya berpendapat hanya - 'Ali dan keturunannya saja yang berhak memimpin umat Islam. Pada perkembangannya, kelompok ini terpecah menjadi beberapa sekte. Namun hanya tercatat tiga sekte saja yang besar dan mampu bertahan dengan ideologi masing-masing yaitu sekte Zaidiyyah, Isma'iliyyah dan Isna 'Asyariyyah. •

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

Al-Bukhari. TT. *Shahih Al-Bukhari, Jilid I.* Kairo: Dar Al-Fikr.

Al-Ghazali. 1972. *Al-Iqtishad Fi Al-I'tiqad.* Mesir: Maktabah Al-Jund.

Al-Mawardi. TT. *Al-Ahkamu Al-Sulthaniyah.* Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Musawi, Musa. 1988. *Al-Syi'ah Wa Al-Tashih: Al-Shuro' Baina Al-Syi'ah Wa Al-Tasyayyu'.* TP.

Audah, Ali. 2008. *Ali Bin Abi Talib Sampai Kepada Hasan Dan Husain.* Jakarta: Litera Antar Nusa. Cet. IV.

Haekal, Muhammad Husain. 1995. *Abu Bakar Al-Shiddiq,* Terjemahan dari Ali Audah. Jakarta: Litera Antar Nusa.

Ibn Khaldun. TT. *Al-Muqaddimah.* Mesir: Mushtafa Muhammad.

Iqbal, Muhammad. 2007. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama.

Muhammad, Hasan Ali Hasan Dan Al-Tum Al-Thalib. 1986. *Tarikh Al-Hadlarah Al-'Arabiyyah Al-Islamiyyah.* Kuwait: Maktabah Al-Falah.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 1986. *Islam Dan Masalah Kenegaraan.* Jakarta: LP3ES.

Nata, Abuddin. 2003. *Metodologi Studi Islam.* Jakarta: RajaGrafindo Persada. Cet. VIII.

Poerwadarminta, W.J.S. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka. Cet. XII.

Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam Dan Tata Negara.* Jakarta: UI Press.

Thabathaba'i, Sayyid Muhammad Husein. 1993. *Islam Syi'ah: Asal Usul Dan Perkembangannya.* Terjemahan Djohan Effendi. Jakarta: Grafiti Press.